

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan menjadi pelaksana atau pengatur atas kelancaran dalam pelaksanaannya. Berkembangnya sarana dan prasarana transportasi serta sistem perekonomian yang terintegrasi, ternyata keadaan yang demikian dapat mendorong sebagian penduduk pedesaan untuk melakukan urbanisasi atau hanya sekedar melakukan aktivitas di kota yang dianggap dapat memberikan pengaruh ekonomi yang lebih baik. Peranan lalu lintas yang signifikan memiliki hal positif bagi masyarakat, tetapi juga ada beberapa hal negatif yang dapat terjadi dalam sirkulasi harian penggunaan jalur lalu lintas. Ketika luas jalur lalu lintas yang digunakan tidak sebanding dengan volume kendaraan yang ada, maka akan terjadi kemacetan lalu lintas. Ruas jalan di Kota Bandung pada tahun 2018 sepanjang 1,172,78 km atau hanya mengalami pertambahan sebesar 0,87% dari tahun sebelumnya. dapat dikatakan panjang ruas jalan yang ada tidak mengalami pertambahan yang signifikan dan relatif stagna. Sedangkan kendaraan bermotor di Kota Bandung pada tahun yang sama sejumlah 1.738.665 unit, sehingga rasio jumlah kendaraan terhadap populasi penduduk di Kota Bnadung sebesar 3;5. Artinya dari 5 orang penduduk di Kota Bandung, 3 orang diantaranya memiliki kendaraan bermotor . fakta tersebut turut didukung dengan *Survei*

*Primer Bandung Road Safety Annual Report 2017* yang menghasilkan data dimana kecepatan rata-rata lalu lintas di kota Bandung hanya berkisar 14,1 km per jam. dengan realita yang ada dimana jumlah kendaraan bermotor di kota Bandung semakin meningkat, maka tidak mengherankan jika kemacetan menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Kota Bandung sebagai pusat seluruh kegiatan di Provinsi Jawa Barat baik itu pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya secara langsung menyebabkan jumlah pertambahan penduduk yang terus meningkat tahun ke tahunnya. Akibatnya, terjadi kesendatan terutama pada sektor transportasi dimana meningkatnya taraf ekonomi masyarakat menyebabkan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas jalan.

Kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi daerah perkotaan, baik kota besar maupun kota berkembang tidak terkecuali kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang merupakan pusat kegiatan nasional yang mampu mendorong kawasan sekitarnya untuk mengembangkan sektor unggulannya seperti pariwisata, kuliner, industri, perdagangan, dan sebagai pusat pendistribusian barang dan jasa dan pusat pemerintahan, sehingga dengan status ini aktivitas masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor di Kota Bandung juga cukup banyak bahkan melebihi angkutan umum yang disediakan pemerintah.

Permasalahan kemacetan dipastikan dapat menimbulkan banyak kerugian khususnya bagi pengguna jalan yang setiap hari harus merasakan kondisi yang tidak nyaman pada saat berkendara. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2009 yaitu Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari system transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan penjelasan di atas sudah jelas seharusnya transportasi dapat mewujudkan kondisi lalu lintas yang selamat, aman, cepat dan nyaman. Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Bandung dibentuk berdasarkan perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan darat, udara, laut, dan komunikasi dan informatika.

Untuk mengatur Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan program *Area Traffic Control System* (ATCS). *Area Traffic Control System* (ATCS) adalah sebuah sistem pengaturan lalu lintas bersinyal terkoordinasi yang diatur mencakup wilayah secara terpusat. Dengan adanya ATCS maka dapat dilakukan upaya manajemen rekayasa

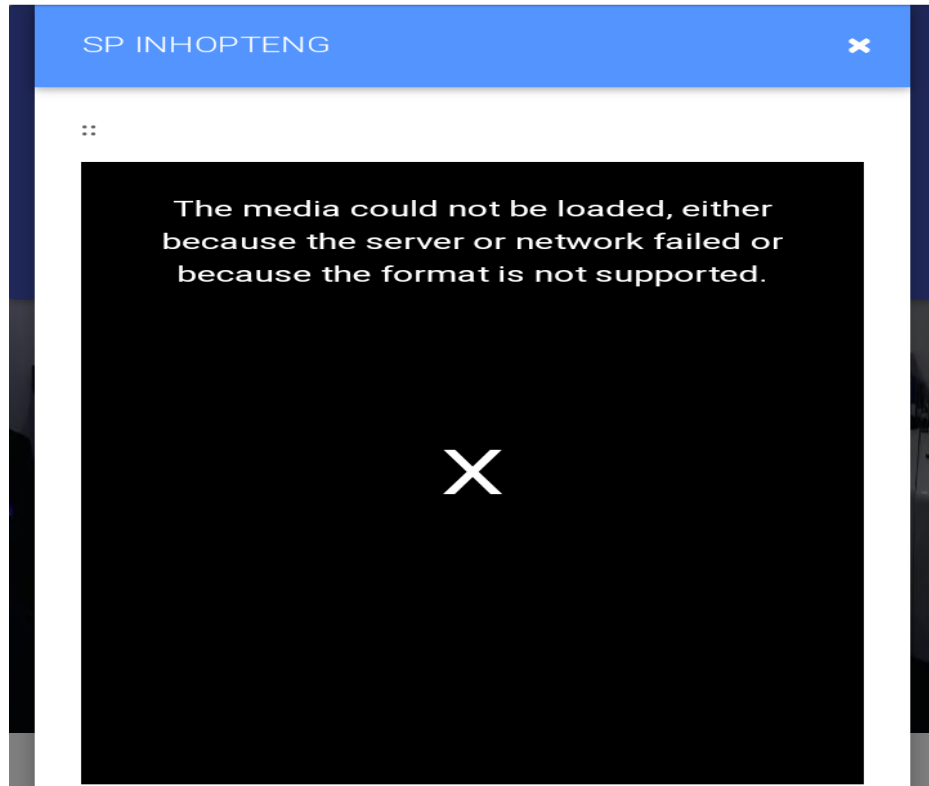
lalu lintas yang mengkoordinasikan semua titik-titik persimpangan bersinyal melalui pusat control ATCS, sehingga diperoleh suatu kondisi pergerakan lalu lintas secara efisien. Teknologi ATCS sendiri telah banyak diterapkan di berbagai kota besar di negara-negara maju. (*Sumber: Dishub Kota Bandung, 2018*).

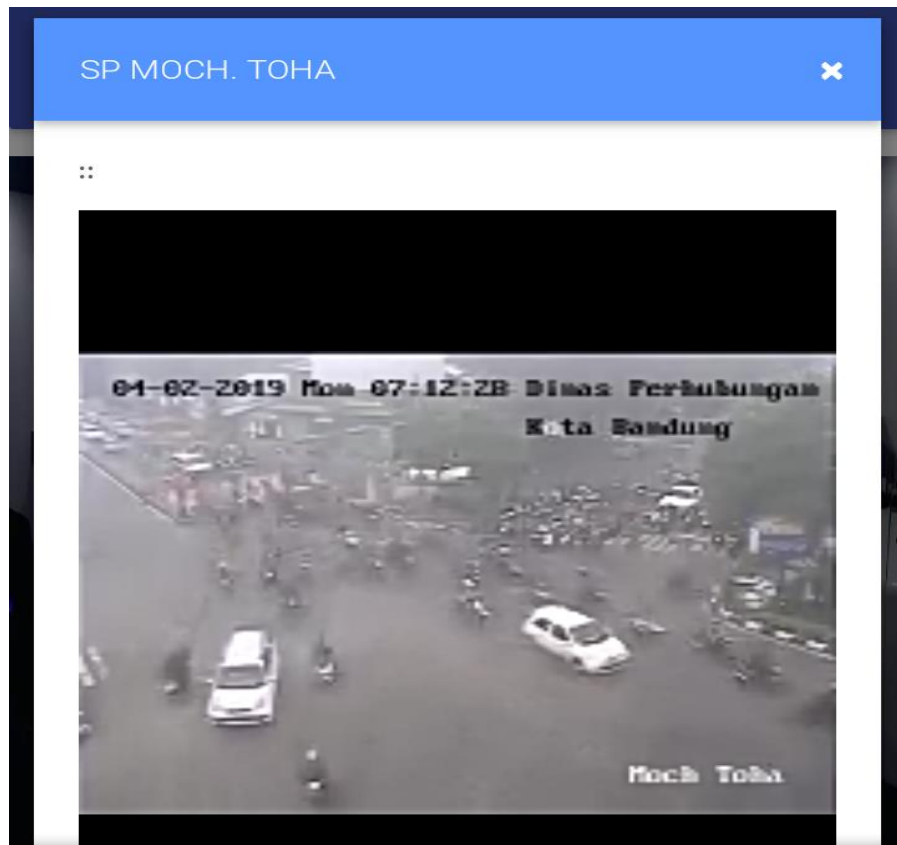
Dengan adanya ATCS, penataan siklus lampu lalu lintas dilakukan berdasarkan input data lalu lintas yang diperoleh secara real time melalui pantauan kamera CCTV pemantau lalu lintas titik-titik persimpangan. Penentuan waktu siklus lampu persimpangan dapat di ubah berkali-kali dalam satu hari sesuai kebutuhan lalu lintas paling efisien yang mencakup keseluruhan wilayah tersebut. Penataan ritme lalu lintas akan lebih baik apabila pemerintah kota menerapkan teknologi ATCS pada semua persimpangan lalu lintas yang ada di kota tersebut.

Dalam pelaksanaan Program ATCS di kota Bandung harapan yang ingin di capai salah satunya adalah mengurangi beban petugas lalu lintas dan menangani kemacetan di persimpangan serta penertiban kendaraan yang berada di persimpangan tersebut. Pelaksanaan program ATCS di kota Bandung belum berjalan dengan baik. Karena di beberapa titik persimpangan masih ada alat ATCS yang tidak berfungsi.

Peneliti memaparkan dalam *website* resmi ATCS Kota Bandung yaitu <http://atcs-dishub.bandung.go.id>. Website tersebut digunakan sebagai media online yang digunakan masyarakat untuk mengetahui kondisi ruas jalan yang akan dilalui selama 24 jam, tetapi media *online* tersebut tidak

berfungsi atau tidak menampilkan kondisi jalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :





Sumber: <http://atcs-dishub.bandung.go.id> diambil pada tanggal 30 januari 2019

**Gambar 1.1**

**kondisi Area Traffic Control System Kota Bandung**

Selain dalam website resmi peneliti juga memaparkan kondisi persimpangan yang terpasang CCTV (ATCS) dengan data yang ada di Dishub Kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

**TABEL 1.1**  
**PERSIMPANGAN AREA ATCS**

*sumber : Dishub Kota Bandung 2019*

| No | Nama persimpangan yang terpasang CCTV | CCTV aktif | CCTV tidak aktif |
|----|---------------------------------------|------------|------------------|
| 1  | Simpang Gedebage                      | Aktif      |                  |
| 2  | Simpang Samsat                        | Aktif      |                  |
| 3  | Simpang Buah Batu                     | Aktif      |                  |
| 4  | Simpang Batununggal                   | Aktif      |                  |
| 6  | Simpang Moch Toha                     | Aktif      |                  |
| 6  | Simpang Inhopteng                     |            | Tidak Aktif      |
| 7  | Simpang Cibaduyut                     |            | Tidak Aktif      |
| 8  | Simpang Kopo                          | Aktif      |                  |
| 9  | Simpang Pasar Caringin                |            | Tidak Aktif      |
| 10 | Simpang Pasir Koja                    | Aktif      |                  |
| 11 | Simpang Cibeureum                     | Aktif      |                  |
| 12 | Simpang Jamika                        | Aktif      |                  |
| 13 | Simpang Gardujati                     | Aktif      |                  |
| 14 | Simpang Otista                        | Aktif      |                  |
| 15 | Simpang Tamblong                      | Aktif      |                  |
| 16 | Simpang Simpa Lima                    | Aktif      |                  |
| 17 | Simpang Gudang Utara                  | Aktif      |                  |
| 18 | Simpang A Yani Laswi                  | Aktif      |                  |
| 19 | Simpang A Yani Supratman              | Aktif      |                  |
| 20 | Simpang Tol Pasteur                   | Aktif      |                  |
| 21 | Simpang Pasir Kaliki                  | Aktif      |                  |
| 22 | Simpang Cipaganti                     | Aktif      |                  |
| 23 | Simpang Cihampelas                    | Aktif      |                  |
| 24 | Simpang Tamansari                     | Aktif      |                  |
| 25 | Simpang Cikapayang                    | Aktif      |                  |
| 26 | Simpang Sulanjana                     | Aktif      |                  |
| 27 | Simpang Merdeka Juanda                | Aktif      |                  |
| 28 | Simpang Cilamaya                      |            | Tidak Aktif      |
| 29 | Simpang Telkom                        | Aktif      |                  |
| 30 | Simpang Trunojoyo                     |            | Tidak Aktif      |
| 31 | Simpang Banda                         | Aktif      |                  |
| 32 | Simpang Lombok                        | Aktif      |                  |

|    |                             |              |  |
|----|-----------------------------|--------------|--|
| 33 | <b>Simpang Cihapit</b>      | <b>Aktif</b> |  |
| 34 | <b>Simpang Aceh</b>         | <b>Aktif</b> |  |
| 35 | <b>Simpang Anggrek</b>      | <b>Aktif</b> |  |
| 36 | <b>Simpang Pahlawan</b>     | <b>Aktif</b> |  |
| 37 | <b>Simpang Cikutra</b>      | <b>Aktif</b> |  |
| 38 | <b>Simpang Cimuncang</b>    | <b>Aktif</b> |  |
| 39 | <b>Simpang Padasuka</b>     | <b>Aktif</b> |  |
| 40 | <b>Simpang Cicaheum</b>     | <b>Aktif</b> |  |
| 41 | <b>Simpang Ujung Berung</b> | <b>Aktif</b> |  |

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa website yang digunakan masyarakat untuk mengetahui kondisi daerah yang akan dilaluinya tidak berfungsi dengan baik. Sebagai sarana informasi publik yang digunakan masyarakat, hal tersebut mengindikasikan bahwa pada operasional program ATCS tersebut terdapat suatu masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan program ini lebih jauh dengan berjudul **“Analisis Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Pelaksanaan Program Area Traffic Control System (ATCS) di Kota Bandung”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **B. Identifikasi Masalah**



berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya pelanggaran disetiap persimpangan yang di pasang cctv disetiap stopan Kota Bandung.
2. Masih banyak cctv ATCS yang rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya di beberapa persimpangan Kota Bandung.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Pelaksanaan program ATCS di Kota Bandung?
2. Apa saja yang menjadi faktor kendala dalam melaksanakan program ATCS ?
3. Apakah dengan diterapkannya program ATCS pelanggaran di persimpangan bisa terasati atau tidak ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pelaksanaan program ATCS di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ATCS.
3. Untuk mengetahui dengan diterapkannya program ATCS pelanggaran di persimpangan bisa teratasi atau tidak.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian keilmuan Administrasi Publik, khususnya kinerja Organisasi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pelaksanaan program ATCS, agar kinerja organisasi tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program ATCS di Kota Bandung. Untuk melihat sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program ATCS oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, maka dilakukan penelitian analisis kinerja terhadap pelaksanaan program ATCS yang dilakukan oleh Dishub. Dalam melakukan penilaian kinerja tersebut digunakan indikator kinerja menurut Mahsun (2014:196) yaitu *Inputs* (Masukan), *Proses*, *Output* (Keluaran), *Outcomes* (Hasil), *Benefits* (Manfaat), *Impact* (Dampak) dalam mengukur kinerja Dishub yang melaksanakan program ATCS di Kota Bandung. Oleh karena itu, peneliti mengguakan indikator tersebut dalam penelitiannya. Indikator-indikator tersebut dijeaskan sebagai berikut:

- a. Indikator Input (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, bahan, kebijakan, waktu dan lain-lain, dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan organisasi.
- b. Indikator Proses melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang mana masukan-masukan yang ada di olah menjadi barang dan jasa sebagai kinerja untuk publik.
- c. Indikator Output meliputi jumlah produk yang dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.
- d. Indikator Outcome (hasil) meliputi tingkat kualitas jasa dan produk yang dihasilkan.
- e. Indikator Benefits (manfaat) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat suatu kegiatan baru bisa diketahui dalam jangka menengah atau jangka panjang, yang mana hasil tersebut dipergunakan secara tepat waktu dan berfungsi penuh.

- f. Indikator Impact (dampak) menggambarkan dampak yang diperoleh dari indikator manfaat.

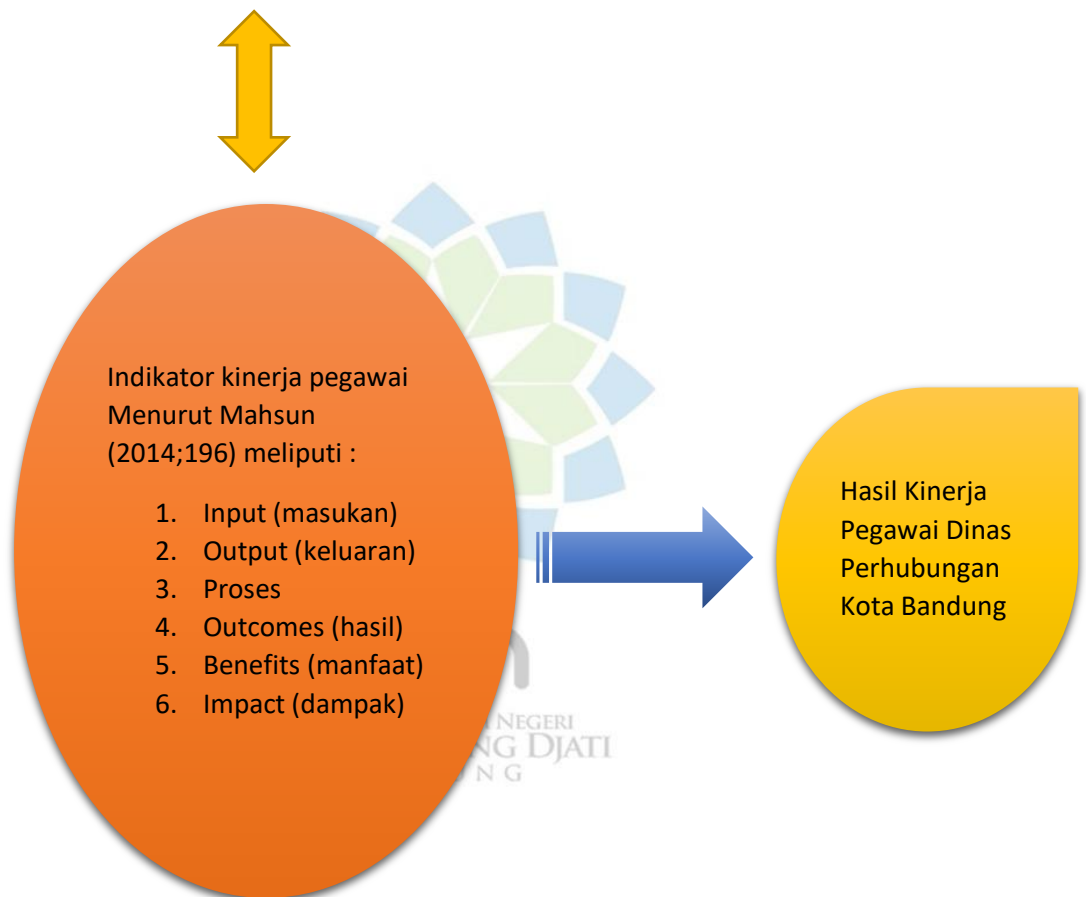
Dengan menggunakan model indikator kinerja tersebut dapat dilihat bagaimana kinerja Dishub Kota Bandung dalam pelaksanaan program ATCS. Untuk lebih mudah memahami inti dari penelitian ini, maka penelitian menggambarkan dalam bentuk kerangka piker sebagai berikut:



**Gambar 1.2**

**Kerangka Pemikiran**

Analisis Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam Pelaksanaan Area Traffic Control System (ATCS)



**G. Proposisi**

Proposisi adalah dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka proposisi kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pelaksanaan program aplikasi Area Traffic Control System (ATCS) akan optimal jika ada input

